

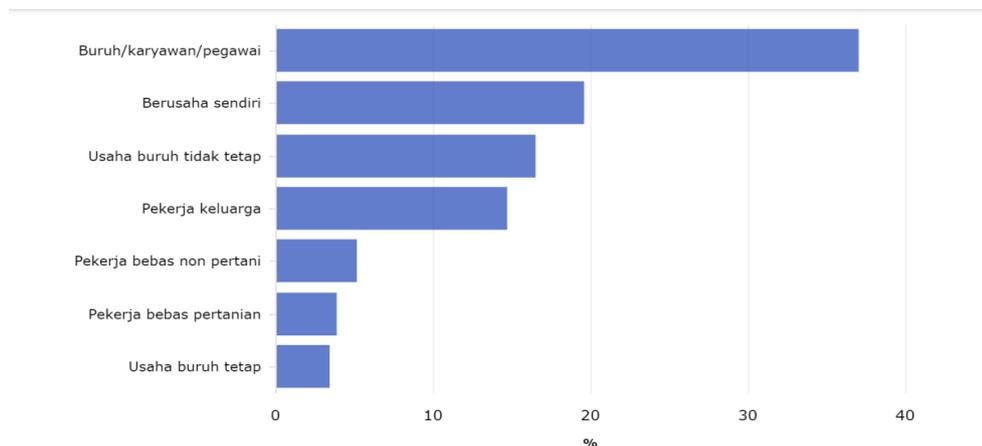
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara agraris, perekonomian Indonesia bergantung atau ditopang oleh sektor ekonomi. Sektor pertanian merupakan sumber perekonomian karena memberikan kontribusi yang tinggi bagi masyarakatnya. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini ²:

Gambar 1.1
Mata Pencaharian Penduduk Indonesia



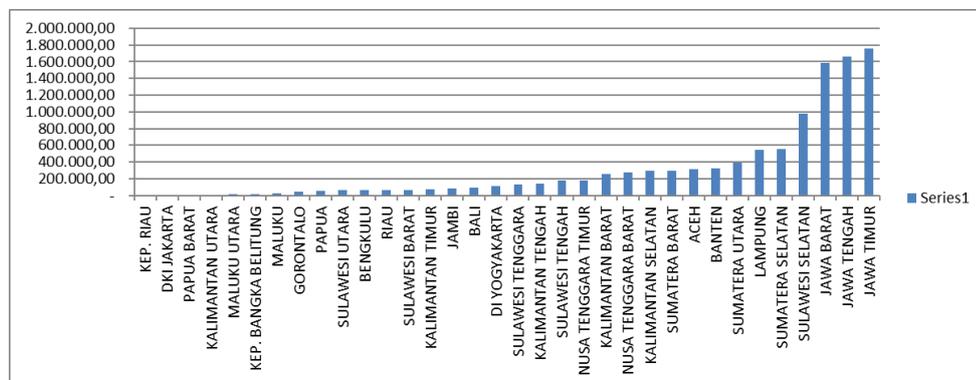
Sumber : Badan Pusat Statistik 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebanyak 37,02% penduduk Indonesia berstatus sebagai buruh, karyawan, dan pegawai pada Februari 2021. Proporsi tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan status pekerjaan utama lainnya. Sebanyak 19,57% penduduk Indonesia menjalani usahanya sendiri. Sebanyak 16,49% penduduk Indonesia yang berusaha dengan dibantu

² Badan Pusat Statistik, diakses pada 28 September 2021 pukul 07.16

buruh tidak tetap. Kemudian, 14,63% penduduk Indonesia berstatus sebagai pekerja keluarga. Proporsi penduduk yang menjadi pekerja bebas di sektor non-pertanian sebanyak 5,11%. Penduduk Indonesia yang menjadi pekerja bebas di sektor pertanian mencapai 5,11%. Sementara itu, terdapat 3,36% penduduk Indonesia berusaha dengan dibantu buruh tetap. Adapun mayoritas penduduk Indonesia atau 29,59% lapangan pekerjaan utama penduduk Indonesia ada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Posisi kedua adalah perdagangan besar dan eceran sebesar 19,20%. Masyarakat Indonesia pada umumnya mengkonsumsi hasil pertanian untuk makanan pokok setiap harinya.³

Gambar 1.2
Luas Panen Padi Menurut Provinsi di Indonesia 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2020

Menurut survey dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, Provinsi yang memiliki hasil panen tertinggi yaitu Provinsi Jawa Timur kemudian diikuti posisi kedua yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat dan yang paling rendah ada di Kepulauan Riau.⁴ Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan

³ Andin Hadiyanto, *Memperkokoh Fondasi Ekonomi & Daya Saing Untuk Indonesia maju*, Direktorat Pemberdahaaran, Jakarta : 2019 Hal.5

⁴ Badan Pusat Statistik 2020, Diakses pada 27 September 2021 pada pukul 10.21

Luas Baku Sawah (LBS) sebesar 1,2 juta hectare, di mana daerah tersebut merupakan terluas di Indonesia. Pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Oktober 2020 menempati peringkat pertama sebagai produsen padi tersebar di Indonesia Tahun 2020. Produksi pada Jawa Timur meningkat 0,44 juta ton dari 9,58 ton pada 2019 menjadi 10,02 juta ton di 2020. Adapun Kabupaten dengan produksi padi tertinggi di Jawa Timur adalah Lamongan (0,87 juta ton), disusul peringkat kedua Kabupaten Ngawi Disusul peringkat kedua Kabupaten Ngawi (0,83 juta ton), dan ketiga Kabupaten Bojonegoro (0,74 juta ton). Kabupaten-kabupaten lain yang memiliki potensi besar seperti Kabupaten Jember, Tuban, Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk yang didaulat untuk peningkatan produksi padi juga akan tetap menjadi andalan sebagai penyokong lumbung pangan nasional.⁵

Seperti yang dijelaskan di atas Kabupaten Tulungagung memiliki potensi besar dalam peningkatan produksi padi yang ada di Jawa Timur, Sebagian besar wilayah Kabupaten Tulungagung yakni kurang lebih 60% dari total wilayahnya daerah subur untuk melakukan kegiatan pertanian terutama yang dilewati langsung oleh Sungai Brantas. Hal tersebut karena sumber irigasi pertanian di Tulungagung bertumpu pada Sungai Brantas. Pada tahun 2016 luas lahan di Kabupaten Tulungagung yaitu 27.616 Ha sawah dan 59.357 bukan sawah. Lahan pertanian tersebut menghasilkan produksi padi sebesar 310.081,16 Ton. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tulungagung bermata pencaharian sebagai petani, sehingga dapat dikatakan bahwa pertanian memiliki peran penting pada kesejahteraan hidup masyarakat

⁵<https://regional.kontan.co.id/news/jawa-timur-kini-jadi-lumbung-padi-terbesar-indonesia-tahun-ini> diakses pada Tanggal 11 Juli 2021 Pukul 16.36 WIB

Kabupaten Tulungagung.⁶

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung tahun 2017 terdapat beberapa Kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang memiliki potensi besar di bidang pertanian antara lain Kecamatan Sendang dan Kecamatan Gondang. Kecamatan Gondang berpotensi karena letak geografis berada di sebelah utara ada Kecamatan Kauman dan Pagerwojo, Timur ada Kecamatan Tulungagung dan Boyolangu sebelah Selatan ada Kecamatan Pakel dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, di mana keadaan iklim yang bagus dan lahan produktif yang artinya memiliki lahan subur yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang melimpah dan berkualitas, apabila dimanfaatkan dengan baik.

Pada sektor pertanian, kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 yaitu kecamatan Boyolangu, Gondang, Karangrejo, Kauman, Campurdarat, Sumbergempol, Ngunut, Pakel. Kelompok 2 yaitu kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru. Kelompok 3 yaitu Bandung, Pagerwojo, Rejotangan, Kalidawir, Sendang, Besuki, Pucanglaban, dan kelompok 4 yaitu Tanggunggunung.

Kecamatan pada kelompok 1 memiliki rata-rata jumlah produksi padi tertinggi daripada kelompok lain serta produksi terendah pada ketela pohon dan kacang tanah. Kecamatan yang berkontribusi tinggi pada padi adalah kecamatan Pakel. Kecamatan pada kelompok 2 memiliki jumlah produksi terendah pada jagung, ketela pohon dan kacang tanah. Kecamatan yang berkontribusi tinggi pada kelompok ini adalah Kecamatan Ngantru. Kecamatan

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung ,di akses pada Minggu, 18 Juli 2021 Pukul 10.44

yang berada di kelompok 3 merupakan daerah di mana rata-rata jumlah produksi kacang tanah lebih tinggi daripada kelompok lain. Kecamatan yang berkontribusi tinggi pada kelompok ini adalah kecamatan Pucanglaban. Kecamatan Tanggunggunung merupakan daerah di mana kontribusi tertingginya pada jumlah produksi jagung dan ketela pohon.⁷

Pertanian di Kecamatan Gondang saat ini masih dinilai sebagai sektor penggerak perekonomian yang penting dan terbukti memiliki ketahanan yang tinggi. Dari data pertanian tanaman bahan makanan meliputi luas panen, produksi, produktivitas dari tanaman padi, palawija, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 2017 di Kecamatan Gondang ditanami padi seluas 1.349 Ha, untuk tanaman ubi kayu yang ditanam di lahan seluas 148 Ha, sedangkan kedelai luas tanamnya 462 Ha⁸.

Keberhasilan sektor pertanian sebagai sektor handal dan tangguh tentunya tidak terlepas dari peran atau daya dukung seluruh aspek sehingga mendorong kemampuan yang cepat dari sektor ini untuk beradaptasi pada berbagai kondisi. Namun pada kenyataannya petani masih saja mengalami hambatan dan kesulitan dalam menghadapi masalah-masalah yaitu hama seperti tikus, wereng gansir, walang sangit. Maka untuk itu petani harus mendapatkan dukungan dan perhatian yang penuh dari Pemerintah terutama dari Pemerintah Desa.

Desa merupakan bagian dari daerah otonom terendah dalam sistem Pemerintahan di Indonesia. Dalam era otonomi diharapkan timbul adanya

⁷ Silvia Astri Rahmaningrum, *Pengelompokan Kecamatan Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Potensi Perekonomian*, (Surabaya: Departemen Statistika Bisnis Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2017), hal. 33-34

⁸ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Gondang Dalam Angka Gondang Sub Regency in Figure 2019*, (Tulungagung : BPS Kabupaten Tulungagung, 2019). hal. 43

kemandirian desa yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam berbagai sektor yang dapat berkembang atau berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi desa. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah menyediakan belanja desa yang dapat mencukupi untuk kebutuhan berbagai sektor-sektor. Pemerintah desa sendiri diharapkan dapat lebih berperan dalam meningkatkan pendapatan di desa dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dan nasional.⁹

Sesuai dengan Pemendragi No.113 Tahun 2014 maka yang disebut dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang juga merupakan hak keuangan desa dan dimandatkan dalam UU desa meliputi Dana Desa bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.¹⁰ Hak dan kewajiban dapat menimbulkan yaitu pendapatan, belanja dan keuangan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan salah satu hal penting untuk menentukan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam tingkat desa.

Optimalisasi pengelolaan anggaran mandiri tingkat desa sumber dana desa yaitu Pendapat Asli Desa (PADesa). Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan dari kewenangan dari desa itu sendiri. Pendapatan asli pedesaan adalah sumber pendapatan desa menungkatkan keuangan desa untuk pelaksanaan

⁹ Adreas Marzel Pelealu, Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012, *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.4 Desember 2013 Hal. 1190

¹⁰ Septi Indah Dewi, *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa* (Yogyakarta : Desa Pustaka Indonesia,2019), Hal.6

hak dan kewajiban desa dalam pembangunan adalah pengelolaan dan pembungan dasa. Peningkatan PADesa merupakan hal yang harus diperhatikan. Apabila meningkat pendapatan dari belanja desa, pembiayaan pengelolaan desa dan pembangunan desa dapat ditingkatkan , Oleh karena itu kemandirian perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas masa di pedesaan dalam fasilitas pembangunan desa.¹¹

Dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintah desa untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan di desa membutuhkan dukungan berupa dana yang cukup agar pemerintah desa dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang ini dicapai. Rendahnya tingkat kemampuan keuangan yang dimiliki desa dan pemerintah desa maka ditetapkan bahwa desa berhak memperoleh bantuan langsung dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota berupa dana desa. Karena dengan adanya dana desa pemerintah lebih mudah menjalankan program–program yang sesuai dengan tujuan dan prioritas yang dibutuhkan masyarakat di wilayahnya.¹²

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih terhadap pengelolaan wilayahnya. Dalam mewujudkan kepedulian pemerintah untuk mengembangkan wilayah pedesaan yaitu pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam setiap periode anggaran yang diberikan kepada desa–desa Kabupaten/Kota untuk

¹¹ Nana Hermansyah, dkk, Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis, *Jurnal Moderat* , Vol.5 No.3 Agustus 2019, Hal. 289.

¹² Sri Mulyani Indrawati, “Buku pintar Dana Desa Dana Desa Untuk kesejahteraan Rakyat” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta : 2017, Hal.15

pembangunan wilayah pedesaan. Dengan adanya pemberian alokasi dana desa ini diharapkan bantuan atau dana yang diperoleh ini membantu untuk membiayai dan mewujudkan program pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan baik.¹³

Upaya meningkatkan keuangan desa di era otonomi desa, Pemerintah desa melakukan berbagai upaya kebijakan mengenai perpajakan daerah. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh setiap Kabupaten. Dalam pemerimaanya difokuskan dalam system bagi hasil didasarkan pada daerah penghasil pajak retribusi tersebut sehingga menguntungkan wilayah tertentu.

Sektor pertanian merupakan salah satu yang bisa memberikan keuntungan di wilayah tertentu. Karena sektor pertanian merupakan salah satu yang memberikan kontribusi dalam hal perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan wilayahnya. Khususnya kekayaan alam yang dimiliki Kecamatan Gondang yaitu lahan sawah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Dalam menghasilkan pendapatan, jumlah sawah yang dimiliki memerlukan modal dan pengembangan agar mendapatkan hasil atau pendapatan yang sesuai, maka diperlukan dari rekening desa dalam membiayai kewenangan tersebut. Desa wajib berperan secara aktif dalam memberikan kontribusi dalam berkembangnya di program pertanian di setiap desa melalui alokasi belanja yang sesuai dengan kebutuhan desa. Jika sektor pertanian adalah sektor potensial maka pemerintah desa seharusnya

¹³ *Ibid.*,

mengalokasikan dana yang cukup untuk belanja pada bidang pertanian.

Paparan di atas menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Terhadap Alokasi Belanja di Bidang Pertanian. Hasil Penelitian ini akan sangat penting karena dengan mengetahui pengaruh tersebut, maka Pemerintah Desa akan dapat menerapkan strategi untuk mengembangkan pertanian dengan lebih baik.

Sekaligus menjadi alasan peneliti memilih tema Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian. Karena pertanian merupakan aspek utama pada setiap desa di seluruh Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan Negara Agraris dengan penghasil bahan pangan dalam jumlah besar dari sektor pertanian khususnya di Desa- Desa di Kecamatan Gondang Tulungagung. Sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi salah satu penyangga perekonomian rakyat Kecamatan Gondang Tulungagung.

Alasan lain peneliti memilih tema berkaitan dengan bidang keuangan desa karena pentingnya pengelolaan keuangan bidang pertanian yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Jika diteliti lebih mendalam alasan lain peneliti adalah Desa- Desa di Kecamatan Gondang lebih produktif dalam pengelolaan dana dan pendapatan pertanian dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Selain itu, desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa salah antara lain pengelolaan PADesa, DD, ADD, dan BHPR dimana pengelolaan tersebut masih ditemukan beberapa

kendala terutama di Kecamatan Gondang.

Penelitian mengenai alokasi belanja di bidang pertanian bukan satu-satunya, yakni penelitian serupa pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan Ummu Habibah menunjukkan bahwa PADesa, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa PADesa, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, akan tetapi DD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan.¹⁴ Dwi Arif Rokhmawan melakukan penelitian tentang APBDes yang menghasilkan temuan bahwa Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pertanian. Namun, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pertanian.¹⁵

Reina Shafira Murti terkait alokasi dana desa yang hasilnya menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja bidang pertanian. Penelitian serupa dilakukan Happy Purbasari, Wisnu Wardana dan terkait pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak retribusi yang hasilnya menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja di bidang pertanian.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian–penelitian terdahulu di atas, maka

¹⁴ Ummu Habibah, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo), *Skripsi*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

¹⁵ Dwi Arif Rokhmawan, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa(Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sragen), *Skripsi*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

dalam penelitian ini akan melakukan penelitian mengenai Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (Add), dan Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) yang diduga mempengaruhi alokasi belanja desa dalam bidang pertanian. Dengan menggunakan regresi panel diharapkan dapat menjelaskan dan mengidentifikasi variabel–variabel apa saja yang berpengaruh dalam penentuan nilai alokasi belanja desa di bidang pertanian di desa–desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan aspek lokasi hal tersebut yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian pada Desa- Desa di Kecamatan Gondang Tahun 2016-2020”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang mungkin muncul dalam penelitian, supaya permasalahan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang dicapai yaitu untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) dan Jumlah Sawah terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian, Identifikasi masalah yang muncul yaitu :

1. Perlunya pemerintah desa dalam upaya menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa (PADesa) agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa.

2. Dana Desa (DD) sebagai sumber dana desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa belum maksimal dialokasikan pada bidang pertanian.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun pada kenyataannya kurang berjalan dengan maksimal terutama pada bidang pertanian.
4. Proposi bagi hasil pajak dan retribusi dalam membiayai belanja desa lebih besar dari pada proporsi pendapatan asli desa terhadap belanja desa, sehingga pengalokasian untuk Belanja Desa menurun.
5. Semakin berkurangnya jumlah lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, mengingat salah satu pendapatan desa berasal dari sektor pertanian.
6. Kurang fokusnya pengalokasian anggaran dana dari pemerintah di bidang pertanian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh signifikan Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016-2020 ?
2. Apakah ada pengaruh signifikan Dana Desa (DD) terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian Tahun 2016-2020 ?
3. Apakah ada pengaruh signifikan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016-2020 ?
4. Apakah ada pengaruh signifikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016-2020?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Desa terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016-2020.
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan antara Dana Desa terhadap terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016-2020.
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan antara Alokasi Dana Desa terhadap terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016-2020.
4. Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan antara Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016-2020.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi atau data yang terkait dengan penelitian ini. Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Bersifat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam bidang keilmuan guna untuk memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi mikro.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti memperoleh pengetahuan praktis terkait ilmu ekonomi mikro mengenai:

a. Bagi Akademis/Institut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan keilmuan khususnya jurusan Ekonomi Syariah, dan menjadi sumbangan akademik yang berguna.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja desa bidang pertanian sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian yang lebih mendalam dan terbaru.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

a. Variabel bebas yang juga sering disebut dengan variabel *independent* adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat (variabel *dependent*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Desa (X1), Dana Desa (X2), Alokasi Dana Desa (X3), Alokasi Dana Desa (X4), Bagi Hasil Pajak Retribusi (X5) yang ada di desa – desa di Kecamatan Gondang.

b. Variabel terikat (variabel *dependent*) adalah yang dipengaruhi atau sebagai akibat adanya variabel bebas (variabel *independent*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian pada desa-desa di Kecamatan Gondang.

2. Keterbatasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan - batasan pada penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas agar tetap

fokus terarah pada pokok permasalahan. Penelitian ini lebih menfokuskan pada variabel pendapat asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak retribusi dan jumlah sawah yang mempengaruhi alokasi belanja desa di bidang pertanian pada desa-desa di Kecamatan Gondang.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan secara Konseptual

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Maka dari itu optimalisasi pendapatan asli desa sangatlah penting. Apabila PADes dapat ditingkatkan maka desa tersebut juga akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut sehingga dapat terwujud desa yang mandiri guna memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa seperti halnya fasilitas-fasilitas dalam bidang kesehatan.¹⁶

¹⁶ Sidik Sakti I.W dan Andina Elok P.M, "Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Rep Publica*, Vol. 3 No. 2, Hal. 4

b. Dana Desa (DD)

Dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.¹⁷

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk Desa, yang mana sumbernya sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Permendagri No.114 Tahun 2014). ADD dari pemerintah bagian dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa ini paling sedikit sebesar 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa, Alokasi Dana Desa sebesar 10% sangat bermanfaat bagi pendapatan desa.¹⁸

d. Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat 3 menyatakan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Dalam Undang- 6 Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

¹⁷ <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-261.pdf> diakses pada Tanggal 11 Agustus 2021 Pukul 14.55 WIB

¹⁸ Riswandi Ilyas, “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa, (Makasar,2019) hal. 34

(BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah.¹⁹

e. Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.²⁰

2. Penegasan Secara Operasional

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa yang dihasilkan dari sumber- sumber asli desa dan peran serta masyarakat, yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dari partisipasi, hasil gotong royong dll.

b. Dana Desa (DD)

Sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara di tranferkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah

¹⁹ Taufiq Bayu Aji. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Analisis Pengaruh Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja di bidang pemberdayaan Masyarakat*, (Klaten : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 67

²⁰ Kementerian Keuangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Tahun 2021 <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/dana-transfer/dak-fisik.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 15.04 WIB

kabupaten/kota digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara sebanding.

d. Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR)

Alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

e. Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian

Alokasi Dana Khusus yang diberikan dibidang pertanian untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian.

H. Sistematika Penulisan Sistematika

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Berikut ini adalah rinciannya :

1. Bagian awal : Halaman sampul depan, sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, daftar abstrak.

2. Bagian tengah :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, yang menguraikan landasan pemikiran secara garis besar. baik dalam teori maupun fakta yang sudah ada, yang akan dibahas dalam penelitian ini. Perumusan masalah berisi mengenai pernyataan tentang keadaan, atau masalah yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Tujuan penelitian merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Manfaat penelitian berisi mengenai manfaat penulisan penelitian ini untuk dapat membantu berbagai pihak yang bersangkutan dan sistematika pembahasan diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas dalam setiap bab yang ada dalam proposal.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan tentang semua variabel yang akan diteliti berdasarkan variabel dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulis dalam upaya menjelaskan atau memahami permasalahan yang diangkat diangkat dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini mencakup beberapa subbab yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan tentang deskripsi data, pengujian hipotesis dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan

Bab ini terdiri atas menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana penelitian yang telah dicapai, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori-teori yang sudah ada, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru dengan tujuan menelaah teori yang sudah ada, menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan penelitian.

Bab VI Penutup

Pada bab bagian akhir ini berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir : Daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup